

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
KABUPATEN BARRU
Jalan. H. A. Iskandar Unru No. 2 Kabupaten Barru 90711



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 352 /BAPPELITBANGDA/VIII/2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Barru Nomor Tahun ... tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun ... Nomor ...);
 12. Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 3. Inspektorat
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 7. Badan Pendapatan Daerah
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 10. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

11. Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14. Dinas Kesehatan
15. Dinas Sosial
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Dinas Tenaga Kerja
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
21. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22. Dinas Perikanan
23. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
24. Dinas Lingkungan Hidup
25. Dinas Perhubungan
26. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
27. Kecamatan

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disajikan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. penutup.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 21 Agustus 2025
BUPATI BARRU,



INA KARTIKA SARI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Barru, di Barru;
3. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
4. Kepala BKAD Kabupaten Barru, di Barru;

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...	II-6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-9
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB. IV PENUTUP	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR
352/BAPPELITBANGDA/VIII/
2025 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja sungguh merupakan isu yang stratejik yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian misi organisasi.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja pada Lingkup Bappelitbangda Kabupaten Barru untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Selama perjalanannya dalam dua triwulan yaitu triwulan I dan triwulan II terdapat ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Bappelitbangda menyusun Perubahan Renja Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan serta hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun 2025 sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari empat tahapan. **Tahapan pertama** yaitu persiapan penyusunan Perubahan Renja yang diawali dengan pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Bappelitbangda. **Tahapan kedua** yaitu penyusunan Rancangan Perubahan Renja yang terdiri dari perumusan rancangan Perubahan Renja dan penyajian rancangan Perubahan Renja. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Perubahan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappelitbangda, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappelitbangda. Rancangan Perubahan Renja Bappelitbangda disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat

Tahapan ketiga yaitu Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Bappelitbangda yang disampaikan kepada Kepala

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

Daerah melalui kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi yang bertujuan menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Bappelitbangda dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD. Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Bappelitbangda paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. **Tahap keempat** adalah penetapan Perubahan Renja Bappelitbangda dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat satu bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Selanjutnya, Perubahan Renja Bappelitbangda tahun 2025 menjadi pedoman Bappelitbangda dalam menyusun Perubahan RKA Bappelitbangda Tahun 2025.

Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Barru yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Selain itu, dalam menjaga sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi perlu memperhatikan keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam RKP dan pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi. Sinergitas dokumen perencanaan diukur dengan melihat 1) kegiatan prioritas Perubahan RKPD yang mendukung pencapaian sasaran PN, PP dan KP dalam RKP, 2) kegiatan prioritas Perubahan RKPD yang mendukung pencapaian sasaran PP dan KP dalam Perubahan RKPD Provinsi, 3) kegiatan prioritas Perubahan Renja Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran PN, PP dan KP dalam Renja K/L, 4) kegiatan prioritas Perubahan Renja Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran PP dan KP dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3)
21. Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 33);
22. Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 23);

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

23. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 56 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 58);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 adalah untuk memberi gambaran akan bentuk kerja Bappelitbangda Kabupaten Barru dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tujuannya adalah:

1. Menghubungkan perencanaan strategis dengan perencanaan operasional yang lebih rinci.
2. Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran.
3. Memudahkan melakukan pengukuran dan penilaian kinerja.
4. memudahkan manajemen dalam menetapkan target pada unit kerja.
5. Memudahkan dalam membuat spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan capaian kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen, adalah:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (kalau sudah tersedia), dan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan sampai dengan Triwulan II.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 memperlihatkan terdapat 2 (dua) Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu: 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik, 2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, dan 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Selain itu terdapat 24 sub kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan karena capaian target berlangsung selama 1 tahun. Hasil evaluasi juga memperlihatkan terdapat 6 (enam) sub kegiatan yang belum memiliki realisasi kinerja sampai dengan triwulan II. Hal ini disebabkan karena saat ini masih dalam proses persiapan sebagai rangkaian tahapan pelaksanaan program. Kinerja akan direalisasikan pada akhir triwulan IV sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.

Rekapitulasi evaluasi kinerja hasil program dan keluaran kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Barru sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan yaitu tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

Tabel II.1
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun Anggaran 2025

N O	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE KINERJA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025)		REALISASI KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025 (%)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level	3	14.799.116.964	1	5.487.988.003	3	3.159.361.446	0	501.284.278	0	904.489.653	0	1.405.773.931	1	6.893.761.934	33,33	46,58
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	Persen	100	11.868.236.964	100	4.804.568.637	100	2.898.685.854	100	418.371.110	100	850.765.428	100	1.269.136.538	100	6.073.705.175	100,00	51,18
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	140	11.868.236.964	27	4.804.568.637	26	2.898.685.854	27	418.371.110	27	850.765.428	27	1.269.136.538	54	6.073.705.175	38,57	51,18
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	1.982.730.000	100	429.652.507	100	114.144.400	16,67	47.417.402	66,67	35.701.460	83,33	83.118.862	100	512.771.369	100,00	25,86
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	29.250.000	1	1.930.000	1	2.033.000	0	0	0	0	0	0	1	1.930.000	20,00	6,60
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	128.020.000	2	136.066.500	4	7.171.400	0	0	3	6.299.500	3	6.299.500	5	142.366.000	62,50	111,21
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5	50.820.000	2	502.000	2	1.786.000	0	0	1	270.000	1	270.000	3	772.000	60,00	1,52
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	140.401.000	5	8.829.064	4	2.900.000	0	0	4	2.880.000	4	2.880.000	9	11.709.064	45,00	8,34
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	33.660.000	1	1.200.000	2	1.180.000	0	0	0	0	0	0	1	1.200.000	20,00	3,57
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	630	1.629.829.000	185	283.054.943	74	99.074.000	36	47.417.402	23	26.251.960	59	73.669.362	244	356.724.305	38,73	21,89
		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	735.000.000	100	218.305.168	100	123.006.192	25	25.378.766	25	18.022.765	50	43.401.531	100	261.706.699	100,00	35,61
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	120	321.000.000	48	89.405.168	24	52.206.192	6	11.878.766	6	10.222.765	12	22.101.531	60	111.506.699	50,00	34,74
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	414.000.000	24	128.900.000	12	70.800.000	3	13.500.000	3	7.800.000	6	21.300.000	30	150.200.000	50,00	36,28
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Persen	100	213.150.000	100	35.461.691	100	23.525.000	33,33	10.117.000	33,33	0	66,67	10.117.000	100,00	45.878.691	100,00	21,38
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	24	115.400.000	9	24.054.691	6	15.025.000	1	10.117.000	0	0	1	10.117.000	10	34.171.691	41,67	29,61
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	273	97.750.000	24	11.407.000	24	8.500.000	0	0	0	0	0	0	24	11.407.000	8,79	11,67
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			100,00	33,51
PREDIKAT KINERJA																			sangat tinggi	sangat rendah
2	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	Persen	100	3.420.000.000	100,00	417.370.486	100	423.902.500	25,00	74.029.654	12,50	84.245.811	37,5	158.275.465	100	575.645.951	100,00	16,83

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

N O	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025)		REALISASI KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025 (%)			
										I		II									
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8÷9*10÷11	(13) = 6 ÷ 12	(14) = 13/5 * 100				
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			Penyusunan Perencanaan dan Pendaan	Persen	100	2.955.000.000	100,00	342.271.731	100	368.901.500	25,00	74.029.654	12,50	82.704.811	37,5	156.734.465	100	499.006.196	100,00	16,89	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	7	70.000.000	3	15.659.490	1	9.676.000	1	6.176.000	0	0	1	6.176.000	4	21.835.490	57,14	31,19
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	6	150.000.000	2	21.920.980	1	14.645.000	1	9.907.500	0	0	1	9.907.500	3	31.828.480	50,00	21,22
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	7	315.000.000	2	50.900.194	2	48.131.000	1	17.050.250	0	18.747.500	1	35.797.750	3	86.697.944	42,86	27,52
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)	dokumen	44	2.420.000.000	15	253.791.067	11	296.449.500	2	40.895.904	3	63.957.311	5	104.853.215	20	358.644.282	45,45	14,82
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUuan	Persen	100	80.000.000	100,00	14.501.780	100	3.695.000	0	0	0	0	0	100	14.501.780	100,00	18,13	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	176	80.000.000	88	14.501.780	44	3.695.000	0	0,00	0	0	0	88	14.501.780	50,00	18,13	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUuan	Persen	100	385.000.000	100	60.596.975	100	51.306.000	19,05	0	42,86	1.541.000	61,90	1.541.000	100	62.137.975	100,00	16,14
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	33	60.000.000	10	21.057.275	5	6.527.000	0	0	5	0	5	0	15	21.057.275	45,45	35,10
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	80	325.000.000	32	39.539.700	16	44.779.000	4	0	4	1.541.000	8	1.541.000	40	41.080.700	50,00	12,64
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			100,00	23,52	
PREDIKAT KINERJA																				sangat tinggi	sangat rendah
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUuan	Persen	100	2.850.000.000	100	237.995.544	100	253.981.000	0	33.305.069	0	68.187.750	0	101.492.819	100	339.488.363	100,00	11,91
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	Rekomendasi / Kajian / Laporan	256	935.000.000	96	78.116.850	48	107.068.000	0	18.538.967	0	36.017.100	0	54.556.067	96	132.672.917	37,50	14,19
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	132	233.750.000	48	36.180.194	24	24.496.800	0	2.744.600	0	6.954.800	0	9.699.400	48	45.879.594	36,36	19,63
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	60	233.750.000	24	50.906.086	12	33.025.000	0	7.492.504	0	6.657.400	0	14.149.904	24	65.055.990	40,00	27,83
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	44	233.750.000	16	31.593.600	8	12.969.400	0	0	0	6.548.900	0	6.548.900	16	38.142.500	36,36	16,32
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada	Laporan	20	233.750.000	8	68.743.194	4	36.576.800	0	8.301.863	0	15.856.000	0	24.157.863	8	92.901.057	40,00	39,74

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

N O	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025)		REALISASI KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025 (%)			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8÷9*10÷11	(13) = 6 ÷ 12	(14) = 13/5 * 100				
				URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Manusia		Bidang Pembangunan Manusia																	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	Rekomendasi / Kajian / Laporan		96	980.000.000	36	44.410.846	18	60.997.200	0	6.413.100	0	11.936.950	0	18.350.050	36	62.760.896	37,50	6,40
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		44	240.000.000	16	28.341.380	8	11.481.800	0	6.413.100	0	3.092.150	0	9.505.250	16	37.846.630	36,36	15,77
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan		20	240.000.000	8	38.210.060	4	18.114.600	0	0	0	3.195.000	0	3.195.000	8	41.405.060	40,00	17,25
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		22	250.000.000	8	7.045.700	4	15.822.800	0	0	0	5.649.800	0	5.649.800	8	12.695.500	36,36	5,08
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan		10	250.000.000	4	11.548.366	2	15.578.000	0	0	0	0	0	0	4	11.548.366	40,00	4,62
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	Rekomendasi / Kajian / Laporan		176	935.000.000	66	115.467.848	33	85.915.800	0	8.353.002	0	20.233.700	0	28.586.702	66	144.054.550	37,50	15,41
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		44	233.750.000	16	42.635.268	8	37.844.800	0	7.335.502	0	12.232.900	0	19.568.402	16	62.203.670	36,36	26,61
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan		20	233.750.000	8	58.307.980	4	45.012.000	0	1.017.500	0	8.000.800	0	9.018.300	8	67.326.280	40,00	28,80
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		77	233.750.000	28	8.917.900	14	852.000	0	0	0	0	0	0	28	8.917.900	36,36	3,82
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan		35	233.750.000	14	5.606.700	7	2.207.000	0	0	0	0	0	0	14	5.606.700	40,00	2,40
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			37,50	12,00	
PREDIKAT KINERJA																			sangat rendah	sangat rendah	
3	Terwujudnya pengembangan daerah yang visioner	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Poin	≥ 60	1.689.000.000	48,50	81.285.839	≥ 60,01	61.086.500	0	17.120.133	0	19.515.900	48,50	36.636.033	48,50	117.921.872	100,00	6,98	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUuan	Persen	100	1.126.000.000	100	42.608.804	100	34.646.000	0	13.384.533	0	6.318.900	100	19.703.433	100	62.312.237	100,00	5,53	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	5	563.000.000	2	22.577.535	1	20.603.500	0	8.689.531	0	3.668.400	0	12.357.931	2	34.935.466	40,00	6,21	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Laporan	5	563.000.000	2	20.031.269	1	14.042.500	0	4.695.002	0	2.650.500	0	7.345.502	2	27.376.771	40,00	4,86	

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

N O	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025)		REALISASI KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025 (%)		
										I		II		(12) = 8÷9× 10÷11		(13) = 6 × 12		(14) = 13/5 × 100		
				URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	Persen	100	563.000.000	100	38.677.035	100	26.440.500	0	3.735.600	0	13.197.000	100	16.932.600	100	55.609.635	100,00	9,88
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	5	563.000.000	2	38.677.035	1	26.440.500	0	3.735.600	0	13.197.000	0	16.932.600	2	55.609.635	40,00	9,88
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			100,00	7,71
PREDIKAT KINERJA																			sangat tinggi	sangat rendah
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 4)																43,66	43,66		83,33	20,58
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 4)																sangat rendah	sangat rendah		tinggi	sangat rendah
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : KONSISTENSI PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA DENGAN RKPD, DAN RENSTRA DENGAN RPJMD																				
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : KETIDAKAKURATAN DALAM MENENTUKAN TARGET KINERJA DAN ANGGARAN BAIK DALAM PERENCANAAN JANGKA MENENGAH MAUPUN TAHUNAN																				
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :																				
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA BERIKUTNYA *) :																				

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Mengingat pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun-tahun lalu mempunyai kinerja baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.

Rekapitulasi hasil pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru
Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi / Proyeksi kinerja Capaian Renstra Tahun Berjalan		Catatan Analisis
			Realisasi	Proyeksi	Ada
1	2	3	4		5
1	Perencanaan Pembangunan				
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

NO	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah	Realisasi / Proyeksi kinerja Capaian Renstra Tahun Berjalan		Catatan Analisis
			Realisasi	Proyeksi	Ada
1	2	3	4		5
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
4	Penelitian dan Pengembangan				
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%	0%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra ; Pengukuran Realisasi dilaksanakan pada Triwulan IV
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	0%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra ; Pengukuran Realisasi dilaksanakan pada Triwulan IV
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	0%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra ; Pengukuran Realisasi dilaksanakan pada Triwulan IV
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	0%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra ; Pengukuran Realisasi dilaksanakan pada Triwulan IV

Untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap bidang urusan perencanaan dan bidang urusan kelitbangan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKK). Kinerja Pelayanan Bappelitbangda terdiri dari 10 IKK yang terdiri dari enam indikator bidang urusan Perencanaan Pembangunan dan empat indikator bidang urusan Penelitian dan Pengembangan. Realisasi indikator sasaran yang telah dicapai sampai dengan tahun 2025 Triwulan II adalah 3 (tiga) indikator yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3)

2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021)
3. Tersedianya dokumen RTRW melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16)

Keberhasilan pencapaian angka 100% ditunjukkan dengan implementasi sistem perencanaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. selain itu terdapat peraturan lainnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk menginisiasi pengembangan aplikasi SIPD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur penggunaan singlecodebase dalam seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD/Renja) dan pengelolaan keuangan daerah (APBD/DPA) pada SIPD di seluruh pemerintah daerah.

Sementara itu terdapat 7 (tujuh) indikator yang belum memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan II. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja saat ini masih dalam proses pelaksanaan program yang kinerjanya akan direalisasikan pada akhir triwulan IV sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya yang merupakan unsur penunjang di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan yang bersinergi dari Nasional, Provinsi dan Daerah. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai. Adapun Identifikasi masalah berdasarkan sebagai berikut:

Tabel II.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru

Urusan	Permasalahan	Penanggung Jawab
1	2	3
Perencanaan	Belum Optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru
	Koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran SKPD belum optimal	
	Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi belum sinergi, masive dan sistematis	
	Monitoring dan evaluasi yang belum optimal	
	Koordinasi dalam upaya penataan peraturan masing kurang sinergi dengan OPD utama	
Penelitian dan Pengembangan	Fungsi kelitbangan belum optimal	
	Kurangnya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengembangan daerah	
	Kualitas SDM yang sesuai	

Urusan	Permasalahan	Penanggung Jawab
1	2	3
	standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja dalam penyusunan dokumen hasil-hasil penelitian yang lebih terarah dan terukur	
	Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.	

Berdasarkan analisis permasalahan yang diperoleh dari perencanaan, penelitian dan pengembangan kabupaten barru, serta dinamika peraturan perundang-undangan dan dinamika pembangunan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah yang dihadapi Bappelitbangda kabupaten Barru, yang antara lain:

Tabel II.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Ketersedian data yang belum akurat	Ketersediaan Data akurat yang kurang memadai	Lemahnya dalam menganalisis data
			Perbedaan data dan Informasi
2.	Koordinasi yang belum optimal	Belum optimalnya koordinasi internal	Analisis Perencanaan belum optimal dalam mengarahkan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah.
3.	Monitoring dan Evaluasi belum optimal	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan belum optimal	Ketersediaan analisa dan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capain kinerja belum ada.
4.	Pemanfaatan hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan	Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan	Kualitas dan kuantitas SDM dan fasilitas pendukung belum memadai.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	pembangunan daerah belum optimal	pembangunan daerah.	
5.	Pemanfaatan Inovasi daerah belum optimal	Pelaksanaan Inovasi daerah belum optimal	Pendampingan dan evaluasi dari keberlanjutan Inovasi belum optimal.

2.3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Proses telaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barru sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru. Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah :

“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Barru diatas adalah sebagai berikut :

Sejahtera adalah Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomo maupun sosial.

Mandiri adalah Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru

Berkeadilan adalah Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang.

Bernafaskan Keagamaan adalah Koondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan.

Adapun misi sebagai berikut :

Misi	
Misi 1 :	Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
Misi 2 :	Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal
Misi 3 :	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal
Misi 4 :	Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
Misi 5 :	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan
Misi 6 :	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
Misi 7 :	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Berdasarkan misi kepala daerah, Bappelitbangda sebagai urusan penunjang menitikberatkan perannya dalam pencapaian Misi Ke-Enam yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi”**.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong, antara lain :

Tabel II.5
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	2	3
1.	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara	Keterlibatan unsur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	2	3
	perencanaan dan penganggaran.	
2.	Belum optimalnya sistem database dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan.	Telah terbentuknya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Koordinasi tim antara bidang-bidang perencana dengan OPD koordinasinya.
3.	Dinamika Perundang-undangan.	Rapat koordinasi teknis pembangunan daerah tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

2.3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penelaahan dokumen Renstra Kementerian dan Provinsi Sulawesi Selatan didalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barru menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan yaitu keselarasan dokumen antara tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Telaah dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Bappenas, Kemendagri maupun Renstra Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait langsung dengan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru.

2.3.3.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 4 (dua) sasaran strategis dalam Renstra 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan

pembangunan nasional.

2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kenijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

- Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2024 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salahsatu sasaran pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 **yaitu *meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.***
- Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

2.3.3.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 telah menetapkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri antara lain:

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi dan;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam negeri.

Tabel II.6
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru
Berdasarkan Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong

No	Sasaran Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Renstra Bappenas			
a.	% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah	Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah yang belum optimal	Perbedaan Periode waktu Perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang baik di Kementrian memudahkan koordinasi.
2.	Renstra Kemendagri			
	% Pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pelayan publik	Pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi belum dioptimalkan sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Kabupaten	Belum Optimalnya Koordinasi untuk memaksimalkan hasil-hasil penelitian dan inovasi untuk kebutuhan perencanaan	Dukungan Pemerintah Pusat terhadap penerapan penelitian dan inovasi dalam pembangunan dan pengembangan daerah

2.3.3.3. Review Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara melaksanakan tugas jangka waktu tahun 2018-2023 telah menetapkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa kebijakan prioritas Provinsi

Selatan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan;
3. Peningkatan kualitas integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pengumpulan, penyajian dan pengamanan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan;
5. Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pendanaan hingga evaluasi.
6. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Tabel II.7
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru
Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Menegah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan			
a.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Belum Optimalnya Sinkronisasi Perencanaan Program tingkat Provinsi dan Kabupaten	Data mikro penunjang perencanaan berbasis kawasan (Kecamatan) masih terbatas.	Terciptanya komitmen antara Prov dan Kabupaten.
b.	Meningkatnya hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah	Masih rendahnya kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daeah	Belum Optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi bagi OPD Kabupaten Barru dalam menyusun Dokumen Perencanaan	Setiap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengmembangan harus melalui Bapedda.

2.3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.3.4.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru

Dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031. Memperhatikan arahan RTRW Kabupaten yang merupakan acuan pemanfaatan ruang, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru sebagai pelaksana urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan mempunyai peran dalam menyesuaikan pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

2.3.4.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barru

Pemerintah Kabupaten Barru dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah merumuskan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2021-2026 yang dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dalam penentuan program dan kegiatan yang berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan, pada penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Barru terdapat Indikator yang menjadi kewenangan Bappelitbangdaialah sebagai berikut:

Tabel II.8
Tabel Indikator TPB Bappelitbangda

NO. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Target (PERPRES 59/2017)
1	2	3	4	5
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	Menurun Menjadi 7-8 %
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Meningkat

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

NO. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Target (PERPRES 59/2017)
1	2	3	4	5
	untuk semua			
		PDB per kapita		Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		Ada
		Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		Ada

Tabel II.9
Faktor Penghambat dan Pendorong Terkait Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Ditinjau dari Keterlibatan RTRW dan KLHS

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
1	Keterlibatan RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Bappelitbangda pada peran koordinasi	Dokumen RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Barru
2	Keterlibatan KLHS	- Belum Optimalnya pengawalan program dan kegiatan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan - Data pendukung	Dinamika Perundang-undangan.	Regulasi tentang KLHS yang mewajibkan untuk penyusunan dokumen KLHS setiap dokumen perencanaan

2.3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappelitbangda Kabupaten Barru senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappelitbangda Kabupaten Barru dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Barru dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu :

- a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Resntra K/L;
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun review singkat dari aspek-aspek dalam perumusan isu-isu strategis sebagaimana yang telah disajikan sebagai berikut:

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

- a. Gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui hampir keseluruhan target di dalam renstra Bappelitbangda telah tercapai. Namun demikian tantangan perencanaan kedepan akan lebih dinamis sehingga Bappelitbangda harus dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menghadapi tatangan tersebut.

- b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas;

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

- Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Bappenas yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan Rencana KerjaK/L dan Daerah. Yang berarti bahwasanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru akan berdampak pada penyusunan nasional.
 - Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Kemendagri yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru;
- Secara umum berdasarkan Renstra yang ingin diraih dalam jangka menengah adalah kualitas perencanaan dan hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam kebijakan.
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;
- Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;
- Implikasi dari KLHS adalah Bappelitbangda dalam menyusun perencanaan harus melakukan kajian Lingkungan Hidup, disebabkan dalam perencanaan pembangunan harus melihat perencanaan mana saja yang dapat memberikan dampak atau resiko bagi lingkungan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026,

maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas data dengan memanfaatkan satu data berbasis teknologi modern;
2. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;
3. Membangun koordinasi antar bidang dan memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan fasilitas pendukung penelitian dan pengembangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah; dan
5. Mendorong ASN aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan 1 OPD 1 Inovasi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan pada dokumen Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) program, 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.104.978.974,00. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.5. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Mebel
 - 1.4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

- 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2.1.1. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 2.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 2.1.4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
 - 2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 2.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 3.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- 3.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- 3.1.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 3.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 3.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - 3.2.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 3.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.3.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 3.3.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

4.1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

4.1.2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

4.2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

4.2.1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2025 disajikan pada table berikut.

Tabel III.1
Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Perubahan Renja
Bapperida Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.990.413.446,00	4.539.698.174,00	4.104.978.974,00	(885.434.472)
5	01					PERENCANAAN		PERENCANAAN						4.806.928.446,00	4.360.949.074,00	4.029.394.374,00	(777.534.072)
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah			Level 3	3 Poin	3.695.333.846,00	3.214.393.974,00	3.306.323.174,00	(389.010.672)
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			20 JPL	28 Orang/bulan				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Daerah	Persentase laporan k perangkat daerah ya dan ditetapkan tepat	Administrasi Keuang Daerah				100%					
5	01	01	2.02	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Barru	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.157.685.854,00			(326.352.412)
5	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			100%	2 Orang	3.000.000,00	12.622.500,00	9.592.000,00	6.592.000

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
											SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	2.05	05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Barru	Barru	3 Orang	2 Orang	3.000.000,00	12.622.500,00	9.592.000,00	6.592.000
5	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100%	0 Paket	193.496.400,00	137.225.800,00	155.237.700,00	(38.258.700)
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket				
										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
											SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket				
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket				
										Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan				
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81 Laporan				
5	01	01	2.06	06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Barru	Barru	1 Paket	0 Paket	5.033.000		0,00	(5.033.000)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
											SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	2.06	06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	Barru	1 Paket	1 Paket	11.171.400	9.405.900,00	9.405.900,00	(1.765.500)
5	01	01	2.06	06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	Barru	1 Paket	1 Paket	3.786.000	4.396.900,00	3.951.300,00	165.300
5	01	01	2.06	06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Barru	Barru	1 Paket	1 Paket	6.940.000	8.550.000,00	8.550.000,00	1.610.000
5	01	01	2.06	06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barru	Barru	1 Paket	1 Paket	1.680.000	1.140.000,00	1.140.000,00	(540.000)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
											SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	2.06	06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	Barru	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	3.468.000,00	2.232.000,00	(2.768.000)
5	01	01	2.06	06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	Barru	88 Laporan	81 Laporan	159.886.000	110.265.000,00	129.958.500,00	(29.927.500)
5	01	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			100%	6 Unit	183.170.400,00	82.276.600,00	125.688.100,00	(57.482.300)
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
											SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	2.07	07	0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	Barru	105 Unit	6 Unit	120.000.000	11.463.500,00	33.596.000,00	(86.404.000)
5	01	01	2.07	07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	Barru	4 Unit	8 Unit	63.170.400	70.813.100,00	92.092.100,00	28.921.700
5	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			100%	24 Laporan	111.006.192,00	111.006.192,00	110.406.192,00	(600.000)
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	2.08	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	Barru	24 Laporan	24 Laporan	52.206.192,00	52.206.192,00	52.206.192,00	0
5	01	01	2.08	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	Barru	12 Laporan	12 Laporan	58.800.000,00	58.800.000,00	58.200.000,00	(600.000)
5	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100%	7 Unit	46.975.000,00	39.929.440,00	74.065.740,00	27.090.740
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit				
5	01	01	2.09	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	Barru	7 Unit	7 Unit	26.475.000	18.200.000,00	32.150.000,00	5.675.000
5	01	01	2.09	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	Barru	34 Unit	38 Unit	13.500.000	15.050.000,00	15.050.000,00	1.550.000

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
											SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	2.09	09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	Barru	1 Unit	1 Unit	7.000.000	6.679.440,00	26.865.740,00	19.865.740
5	01	02					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD			100%	100%	553.555.500,00	622.786.000,00	363.152.400,00	(190.403.100)
								Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD		2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD			100%	100%				0
										3. Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD			0%	85%				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			100%	2 Berita Acara	466.106.500,00	452.135.700,00	315.135.200,00	(150.971.300)
									Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara				
									Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara				
									Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				11 Dokumen				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	02	2.01	01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Barru	Barru	2 Berita Acara	2 Berita Acara	25.350.000	20.548.400,00	6.596.000,00	(18.754.000)
5	01	02	2.01	01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Barru	Barru	2 Berita Acara	2 Berita Acara	38.005.000	37.724.400,00	32.011.000,00	(5.994.000)
5	01	02	2.01	01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Barru	Barru	2 Berita Acara	2 Berita Acara	57.735.000	59.136.200,00	28.429.500,00	(29.305.500)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	02	2.01	01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Barro	Barro	11 Dokumen	11 Dokumen	345.016.500	334.726.700,00	248.098.700,00	(96.917.800)
5	01	02	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			100%	44 Orang	9.695.000,00	10.411.500,00	7.775.000,00	(1.920.000)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	02	2.02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Barru	Barru	44 Orang	44 Orang	9.695.000,00	10.411.500,00	7.775.000,00	(1.920.000)
5	01	02	2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			100%	10 Laporan	77.754.000,00	160.238.800,00	40.242.200,00	(37.511.800)
									Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				16 Laporan				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	02	2.03	03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Barru	Barru	10 Laporan	10 Laporan	19.895.000,00	9.546.600,00	5.175.600,00	(14.719.400)
5	01	02	2.03	03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Barru	Barru	16 Laporan	16 Laporan	57.859.000,00	150.692.200,00	35.066.600,00	(22.792.400)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			100%	100%	558.039.100,0 0	523.769.100,0 0	359.918.800,0 0	(198.120.300)
									2. Persentase Keselarasan Program Prioritas Renja dengan Prioritas Nasional				100%				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	03	2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi/kajian/laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			64 Rekomendasi / Kajian / Laporan	36 Dokumen	249.872.300,00	230.306.700,00	195.303.700,00	(54.568.600)
									Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				12 Laporan				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
															SEBE LUM PERU BAH AN	SETE LAH PERU BAH AN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
										Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				12 Dokumen								
										Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan								

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
											SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	03	2.01	01	0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Barru	36 Dokumen	36 Dokumen	52.375.000	49.701.300,00	21.254.800,00	(31.120.200)
5	01	03	2.01	01	0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Barru	Barru	12 Laporan	12 Laporan	75.516.000	73.047.500,00	105.294.500,00	29.778.500

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	03	2.01	01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Barru	12 Dokumen	12 Dokumen	39.269.000	30.703.500,00	15.353.000,00	(23.916.000)
5	01	03	2.01	01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Barru	Barru	4 Laporan	4 Laporan	82.712.300	76.854.400,00	53.401.400,00	(29.310.900)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi/kajian/laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			24 Rekomendasi / Kajian / Laporan	12 Dokumen	140.970.800,00	122.973.200,00	66.582.200,00	(74.388.600)
									Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				4 Laporan				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
							SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
											SEBE LUM PERU BAH AN	SETE LAH PERU BAH AN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen				
										Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	03	2.02	02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Barru	12 Dokumen	12 Dokumen	32.007.800	32.777.500,00	11.329.600,00	(20.678.200)
5	01	03	2.02	02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Barru	Barru	4 Laporan	4 Laporan	37.865.000	30.429.700,00	24.760.100,00	(13.104.900)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	03	2.02	02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Barru	6 Dokumen	9 Dokumen	35.176.500	32.665.600,00	15.628.100,00	(19.548.400)
5	01	03	2.02	02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Barru	Barru	2 Laporan	3 Laporan	35.921.500	27.100.400,00	14.864.400,00	(21.057.100)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi/kajian/laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			44 Rekomendasi / Kajian / Laporan	12 Dokumen	167.196.000,00	170.489.200,00	98.032.900,00	(69.163.100)
									Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				21 Dokumen				
									Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				7 Laporan				

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	03	2.03	03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Barru	12 Dokumen	12 Dokumen	65.094.000	65.729.100,00	35.435.500,00	(29.658.500)
5	01	03	2.03	03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Barru	Barru	4 Laporan	4 Laporan	69.907.000	71.281.500,00	50.396.800,00	(19.510.200)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	03	2.03	03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Barru	21 Dokumen	21 Dokumen	14.270.000	15.121.500,00	4.021.500,00	(10.248.500)
5	01	03	2.03	03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Barru	Barru	7 Laporan	7 Laporan	17.925.000	18.357.100,00	8.179.100,00	(9.745.900)
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						183.485.000,00	178.749.100,00	75.584.600,00	(107.900.400)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan			≥ 60,25 Poin	100%	183.485.000,00	178.749.100,00	75.584.600,00	(107.900.400)
									2. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan				100%				
5	05	02	2.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah			1 Laporan	1 Laporan	112.120.000,00	106.572.700,00	46.963.700,00	(65.156.300)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			1 Laporan	1 Laporan				
5	05	02	2.01	01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Barru	Barru	1 Laporan	1 Laporan	59.295.000	52.522.900,00	36.240.900,00	(23.054.100)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	05	02	2.01	01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Barru	Barru	1 Laporan	1 Laporan	52.825.000	54.049.800,00	10.722.800,00	(42.102.200)
5	05	02	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			1 Laporan	1 Laporan	71.365.000,00	72.176.400,00	28.620.900,00	(42.744.100)

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

KODE						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2025				PAGU INDIKATOR			
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATOR			
										SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (RENJA 2025)	SEBELUM PERUBAHAN (DPA 2025)	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	05	02	2.04	04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Barru	Barru	1 Laporan	1 Laporan	71.365.000,00	72.176.400,00	28.620.900,00	(42.744.100)

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting

- a. Penyusunan Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Perubahan Renja Bappelitbanda Kabupaten Barru Tahun 2025 berpedoman pada perubahan RKPD Tahun 2025 yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan serta hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan menunjukkan ketersediaan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tidak sesuai dengan target kinerja terutama untuk program-program prioritas (Major Project). Hal ini disebabkan kebutuhan pendanaan pembangunan terus meningkat sedangkan sumber dana publik terbatas, maka sumber

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

pendanaan dapat diperoleh melalui Mitra Kerjasama/Lembaga Non Pemerintah.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

- a. Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 memuat pergeseran pagu antar sub kegiatan. Selain itu, terdapat penambahan sub kegiatan yang mana pada DPA Tahun 2025 tidak mendapatkan pengangggaran disebabkan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran. Pergeseran anggaran dan penambahan sub kegiatan menyebabkan pengurangan/penambahan target kinerja khususnya pada kegiatan-kegiatan penunjang urusan.
- b. Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Bappelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappelitbangda Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPPA pada triwulan IV dan akhir tahun, yang bertujuan memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Bappelitbangda kabupaten dapat dicapai dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda kabupaten Barru serta visi dan misi pembangunan tahunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.
- b. Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 menjadi pedoman kerja bagi seluruh ASN lingkup Bappelitbangda Kabupaten Barru sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan tetap berpegang teguh pada core

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

value BerAKHLAK dan senantiasa berorientasi pada peningkatan manajemen kinerja.

Barru, 18 Agustus 2025

Plt. KEPALA BADAN,


Dr. S. RIFATULLAH AKIL, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 198507012003121001